MENGENAL LEBIH DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HINGGA JENJANG PERGURUAN TINGGI

Tsabitah Rafifah, Dinie Anggraeni Dewi

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Cibiru, Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Pendidikan No.15, Cibiru Wetan, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat 40625 bitaa.rafifah@upi.edu

dinieanggaraenidewi@upi.edu

**Abstrak**

*Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku siswa. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.*

*Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran Civics atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde*.

***Kata kunci*** *: PKn, Kewarganegaraan*

***Abstrack***

*Citizenship Education (Civics) is one of the compulsory subjects from Elementary School to Higher Education. Citizenship education must pay attention to the development of values, morals, and student behavior attitudes. The mission of Citizenship Education itself is to educate the nation's life.*

*The word for citizenship in Latin is called Civicus. Furthermore, the word Civicus is absorbed into English to become the word Civic which means citizens or citizenship. From the word Civic, the word Civic was born, namely citizenship science, and Civic Education, namely Citizenship Education. Civics or citizenship lessons have been known in Indonesia since the Dutch colonial era under the name Burgerkunde.*

***Key words****: Citizenship Education, Citizenship*

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, setiap suatu bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu yang dinama terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriolis dan lain sebagainya yang pada saat itu menempel erat pada setiap jiwa warga negaranya. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang makin pesat, nilai-nilai tersebut makin lama makin hilang dari diri seseorang di dalam suatu bangsa, oleh karena itu perlu adanya pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga negara agar setip warga negara tahu hak dan kewajiban dalam manfaat mengenai pendidikan kewarganegaraan

Metodologi Jenis Penulisan

Penulisan makalah ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode atau cara kerja dalam suatu pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis situasi dan kondisi suatu obyek permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil

menjalankan kehidupan berbangasa dan bernegara.

1. Rumusan Masalah
2. Apa pengertian dari pendidikan kewarganegaraan?
3. Apa tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan?
4. Manfaat apa yang bisa didapatkan ketika seseorang belajar pendidikan kewarganegaran?
5. Tujuan
6. Menjelaskan kepada pembaca tentang pendidikan kewarganegaraan
7. Memberikan
8. Mengajak para pembaca agar bisa paham mengenai pendidikan kewarganegaraan

telaah pustaka yang menunjang (studi literatur).

Fokus Penulisan

Obyek permasalahan adalah mengenalkan lebih jauh tentang pendidikan kewarganegaraan. Penulis mencoba memberi tahu lebih detail apa itu PKN, tujuannya apa, serta hal- hal lain yang berkaitan dengan PKN.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada studi ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari pustaka yang menunjang seperti jurnal dan dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa data sekunder yang berhubungan dengan topik dan masalah yang terkait dengan PKN.

Kajian Pustaka

Menurut National Council of Social Studies (NCSS) Amerika Serikat, PKN adalah proses yang meliputi semua pengaruh positif yang dimaksud

untuk membentuk pandangan seorang warga negara dalam peranannya di

masyarakat. Hasil Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics di Tawangmangu juga menyatakan hal senada, bahwa PKn sebagai suatu

program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga negara yang

lebih baik menuurut syarat-syarat, kriteria, dan ukuran, ketentuan- ketentuan

pembukaan UUD 1945 (Cholisin, 2000: 1.7).

Sementara itu Nu’man Soemantri memberikan pengetian bahwa PKn

adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positive influence

pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses

untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, dan bertindak

demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan

Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2000:1.7).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk membentuk warga

negara yang baik, berakhlak mulia, mampu menjalankan hak dan kewajiban

sebagai warga negara, serta mampu berperan dalam masyarakat.

Pembahasan

# Pengertian pendidikan kewarganegaraan (PKN)

Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan.

Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran Civics atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49), adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak- hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.

Sementara itu,siswa/ mahasiswa sebagai anak bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karna Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern.

# Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan

bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai imu pengetahuaan dan teknologi serta seni.

Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan tinggi adalah (a)berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsanya.

* 1. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan

dan / atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya

saing bangsa.

* 1. dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi

kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia

* 1. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya

penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. (UU Nomor 12 Tahun 2012)

Berdasarkan beberapa kutipan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat

diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu

membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi ilmuan

yang bukan saja memiliki ilmu pengetahuan melainkan juga memiliki sikap,

keterampilan dan kesadaran bernegara yang tinggi sehingga akan membawanya

menjadi warganegara yang bertanggungjawab untuk berpartisipasi dan memiliki disiplin yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negaranya.

# Manfaat Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan

1. Civic Education tidak hanya sekadar melayani kebutuhan- kebutuhan warga dalam

memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi, tetapi lebih dari itu. Ia pun memberikan informasi dan wawasan tentang berbagai hal menyangkut cara- cara penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, civic education juga menjanjikan civic knowledge yang tidak saja menawarkan solusi alternatif, tetapi juga sangat terbuka dengan kritik (kontruktif).

1. Civic education dirasakan sebagai sebuah kebutuhan mendesak karena merupakan sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Pendidikan yang bersifat demokratis, harus memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan akan peran warga dalam masyarakat demokrati. Guna membangun masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan agar warganya dapat mengkritisi dan memahami permasalahan yang ada.

# Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi masa depan memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tecakup dalam Pendidikan

Kewarganegaraan. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh Pendidikan Kewarganegaran, akan lebih baik lagi jika Pendidikan ini di manfaatkan untuk pengembangan diri seluas- luasnya. Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat kita tidak akan mudah goyah dengan iming-iming kejayaan yang sifatnya hanya sementara. Selain itu, kita tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai

segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara kita.

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia (global society). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diimplementasikan dengan baik melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan pembelajaran yang berlandaskan pada tujuan pendidikan serta pemantauan pembelajaran melalui

evaluasi, maka tujuan dari pembelajaran PKn dapat dicapai dengan baik serta mampu membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari NKRI serta merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, citacita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan

umum. Sehingga, semakin berkualitas implementasi pembelajaran PKn maka akan semakin baik kesadaran mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memegang peranan penerus bangsa Indonesia.

# Pentingnya Pendidikan kewarganegaraan bagi Generasi Muda Indonesia

Dengan pendidikan kewarganegaraan ini para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara-cara yang damai dan cerdas.

Mencetak generasi muda yang bertanggungjawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh- pengaruh dari luar, mengambil

sisi positifnya dan menolak hal- hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa.

Akhirnya, Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus iklhas untuk menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air walaupun mendapat iming- iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain.

# Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Mata Kuliah yang Lain

1. PKN dengan Pelajaran Ilmu Sosial

Pendidikan kewarganegaraan merupakan praktik dari ilmu kewarganegaraan, sedangkan ilmu kewarganegaraan adalah bagian dari ilmu politik. Seperti yang dikemukakan oleh checter van yakni bagian dari ilmu poltik ang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat di civics/ilmu kewarganegaraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengandung praktik-praktik yang diturunkan ilmu politik. Sesuai

dengan tujuan PKn yaitu menjadikan warganegara yang baik. Maka kita harus memahami teori tentang demokrasi politik yang meliputi konstitusi, parpol pemilu dan semuan hal itu merupakan adopsi dari ilmu politik. Dengan memahami teori ilmu politik maka warga negara mempunyai pengetahuan tentang kenegaraan melalui praktis dari pendidikan kewarganegaraan maka warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dan mengetahui hak yang harus diterimanya sebagai warga negaa yang baik.

1. PKN dengan Sosiologi

Sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat. Yang mana yang dibahas tidak hanya keteraturan dalam msyarakat tetapi juga penyimpangan sosial. Salah satu penyebab terjadi penyimpangan sosial yaitu kekurangpahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contoh kasus keterkaitan sosiologi dengan pendidikan kewarganegaraan, dalam sebuah desa mempunyai kendala dalam aksesbilitas. Seperti kurang memadainya jalan raya untuk masyarakat desa untuk keluar dari desa dalam rangka memenuhi kebutuhan, seperti berjualan,

melanjutkan pendidikan, dan membeli kebutuhan rumah tangga yang tidak disediakan desa.

Namun hal tersebut terkendala sehingga menimbulkan ketergangguan pola kehidupan masyarakat, terjadinya konflik antar masyarakat dan meresahkan kondisi desa. Bagi masyarakat yang paham dengan haknya sebagai warganegara maka mereka akan menuntutnya sesuai prosedur tanpa harus meresahkan kampungnya sendiri. Kemudan jika mereka memahami tentang kewajiban sebagai warga negara maka mereka akan berusaha memenuhi kewajibannya seperti pajak supaya pemerintah dapat membangun sarana umum seperti yang diinginkan dan mengelola sumberdaya ala dengan baik. Jadi pendidikan kewarganegaraan dapat menjad solusi permasalahan di masyarakat. Sama-sama mengkaji masyarakat / warga negara.

1. PKN dengan Ilmu Sejarah

Dalam mempelajari sejarah terdapat latarbelakang mempelajari pendidikan kewarganegaraan, proses dan alasannya pendidikan

kewarganegaraan dipelajari. Kemudian dengan pada ilmu

sejarah dapat diketahui mengapa perlunya pendidikan yang bertujuan menjadikan warga negara yang baik. Semua itu didasari oleh sejarah/peristiwa yang terjadi diwaktu yang lalu. Dengan mempelajari sejarah kita dapat mengetahui kekurangan apa yang akan terdapat pada era dulu dan diperbaiki pada masa sekarang sehingga terdapat perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu. Dengan mempelajari sejarah dapat ditemukan hal positif yang dapat dipertahankan untuk tercapanya tujuan PKn saat ini atau kedepannya.

1. Keterkaitan antara PKN dan IPS

Keterkaitan PKn dengan IPS sangat kuat. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan yang menurut Kurikulum tahun 1994 diberi nama Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (sebagai upaya mewujudkan pesan UU sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 khususnya Pasal 39 Ayat (2) dan (3)), Bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan adalah bagian dari Bidang Studi IPS. Bidang Studi IPS mencakup aspek Geografi, Ekonomi, dan Sejarah,

Pancasila serta UUD 1945 yang menyangkut warga negara serta pemerintahan. Kemudian terjadi pemisahan menjadi Bidang Studi IPS yang mencakup aspek Geografi, Ekonomi, dan Sejarah, dan Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila yang mencakup Pancasila serta UUD 1945 yang menyangkut warga negara serta pemerintahan.

# Pengembangan Nilai-nilai Kewarganegaraan

Nilai adalah sesuatu yang berharga, yang berguna, yang indah, yang memperkaya batin. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong, mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem (sistem nilai) merupakan salah satu wujud kebudayaan, disamping sistem sosial dan karya. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan karakter bangsa

rbangsa dan bernegara. Misalnya, bagaimana seseorang bangsa Indonesia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai anggota masyarakat, bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku sebagai komponen bangsa, serta bagaimana ia harus

yang semakin menurun. Nilai- nilai karakter bangsa yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara static menjadi dasar negara, ideologi nasional dan jati diri bangsa, sedangkan secara dinamik menjadi semangat kebangsaan. Sebagai dasar negara nilai-nilai karakter bangsa tersebut melandasi segala kegiatan pemerintahan negara, baik dalam pengelolaan pemerintahan negara maupun dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain.

Nilai-nilai karakter bangsa dalam hal ini juga menjadi etika bagi penyelenggara negara. Sebagai jati diri bangsa, nilai tersebut berwujud menjadi sikap dan perilaku yang nampak pada atau ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, be

bersikap dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan nilai karakter bangsa teridentifikasi sejumlah nilai sebagai berikut :

1. Religius
2. Jujur
3. Toleransi
4. Disiplin
5. Kerja keras
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokrasi
9. Semangat kebangsaan
10. Cinta tanah air (patriotisme)
11. Rasa ingin tahu
12. Menghargai prestasi
13. Bersahabat
14. Gemar membaca
15. Peduli lingkungan
16. Peduli sosial
17. Tanggung jawab
18. Cinta damai

# PKN di Sekolah Dasar

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar memiliki arti penting bagi

siswa pada pembentukan pribadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan

hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan

berkarakter yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

(Depdiknas, 2006:97-104).

Menurut Undang-Undang yang sesuai dengan Pendidikan Kewernegaraan Sistem

Pendidikan Nasional merupakan mata ajaran wajib bagi seluruh peserta didik disemua

jalur dan jenjang Pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Civis Education

juga seyogyanya diberikan kepada setiapa warga negara Indonesia. Peendidikan

Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga masyarakat, warga

bangsa, dan warga negara yang dapat diandalkan oleh pribadinya, keluarganya,

lingkugannya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya dalam mencapai cita-cita bersama

(Rahayu, 2007).

Esensi dari rumusan tujuan Pendidikan Kewarganegaran tersebut, meliputi :

1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
2. Mengembangkan potensi peserta didik,
3. Berakhlak mulia,
4. Sehat,
5. Berilmu,
6. Cakap,
7. Kreatif,
8. Mandiri, dan
9. Menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

# Ruang Lingkup Pembelajaran PKN

Ruang lingkup dalam mata pelajaran PKN meliputi beberapa aspek yaitu:

Persatuan serta kesatuan bangsa, terdiri dari hidup rukun dalam perbedaan, sumpah pemuda, kebanggaan sebagai bangsa indonesia, cinta lingkungan, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan juga jaminan keadilan.

Norma, hukum dan juga peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, norma yang berlaku di masyarakat, tertib di sekolah, norma- norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peraturan-peraturan daerah, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

Hak asasi manusia terdiri dari hak dan juga kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM,

instrumen nasional dan internasional HAM.

Kebutuhan warga Negara yaitu meliputi hidup gotong royong, prestasi diri, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, harga diri sebagai warga masyarakat,menghargai keputusan bersama, dan persamaan kedudukan warganegara.

Konstitusi Negara yaitu meliputi proklamasi kemerdekaan serta konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan Indonesia, hubungan dasar negara dengan kostitusi.

Kekuasaan dan Politik terdiri dari Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Budaya politik, Demokrasi dan sistem politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Pers dalam masyarakat demokarasi dan Sistem pemerintaha

Pancasila meliputi dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life, weltanschaung, wereldbeschouwing, wereld en levens

beschouwing, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup dan petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakn pembuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis.

# Pembelajaran PKN di Sekolah Menengah Pertama

Proses pelaksanaan PKn lebih dominan pada penguasaan materi yang tidak mengembangkan nilai-nilai karakter PKn. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

# Tujuan PKN di Sekolah Menengah Pertama

1. Menambah pengetahuan atau wawasan peserta didik akan segala hal yang

terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan

benarmelalui berbagai cara dan metode(aspek kognitif).

1. Membina dan membentuk sikap warganegara yang mau dan meyakini

akanpengetahuan yang telah diperoleh. Dengan demikian, pengetahuan yang

telah dipahami tersebut akandiyakini dan terinternalisasi dalam diri atau

mempribadi dalam jiwa peserta didik, yang akan menjadi sikapnya dalam

menanggapi persoalan-persoalan yang ada (aspek sikap).

1. Melatih keterampilan kewarganegaraan kepada peserta didik untuk dapat

menjadi warga negara yang terampil berdemokrasi. Hal ini dilakukan melalui

atau dengan cara membiasakan atau membudayakan kepada peserta didik

bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam

kehidupan sehari-haraspek Psikomptor).

# Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran PKn untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek aspek sebagai berikut:

* 1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
	2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
	3. Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM.
	4. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan

mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.

* 1. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
	2. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
	3. Pancasila, meliputi, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilainilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
	4. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional danorganisasi internasional, dan mengevaluasi

globalisasi.

# Pembelajaran PKN di Sekolah Menengah Atas

Mata pelajaran PKn, hingga saat ini selalu ditempatkan sebagai mata pelajaran yang dikesampingkan. Mata pelajaran PKn selalu dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak jelas akan keilmuaannya, yang mana objek yang dipelajari dalam PKn masih dianggap rancu. Sehingga tidak jarang mata pelajaran PKn dipandang sebelah mata, bahkan menganggap PKn itu mudah dan semua guru bidang apa saja bisa untuk mengajarkan mata pelajaran ini. Bahkan mata pelajaran PKn diajarkan oleh guru yang bukan dari bidang mata pelajaran PKn.

Padahal menurut pandangannya Nu’man Somantri (Chlosin, 2000: 1.8) memberikan pengertian PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positive influensce pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

# Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas

Tujuan Program Studi:

* + 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial.
		2. Melahirkan karya-karya penelitian yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar- dasar/prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah di bidang pendidikan.
		3. Mendiseminasikan hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian di bidang pendidikan kepada masyarakat.
		4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan hidup khususnya yang terkait dengan dunia kerja.

# Ruang Lingkup PKN di Sekolah Menengah Atas

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan

1. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
2. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
3. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan

berorganisasi, Kemerdekaan

mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga negara

1. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia,

Hubungan dasar negara dengan konstitusi

1. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
2. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
3. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

# Pembelajaran PKN di Perguruan Tinggi

Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang

nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, serta SK dirjen DIKTI nomor 43/DIKTI/Kep/2006, mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi terdiri atas pendidikan agama, pendidikan Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Cakupan materi Mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan meliputi identitas nasional,hak dan kewajiban warganegara, negara dan konstitusi, demokrasi dan pendidikan demokrasi, HAM dan rule of law, Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35

ayat (3) Juga mewajibkan mata kuliah Kewarganegaraan disampaikan di Perguruan Tinggi. Dalam penjelasan pasal 35 ayat (3), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ”mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

# Tujuan PKN di Perguruan

**Tinggi**

1. mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral etika dan religius
2. menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
3. menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air
4. mengembangkan sikap demokrasi berkeadaban dan

bertanggungjawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi

1. menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

# Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi beberapa aspek-aspek seperti: Persatuan dan kesatuan bangsa Norma, hukum dan peraturan Hak asasi manusia Kebutuhan warga negara Konstitusi negara Kekuasaan dan politik Pancasila

# Saran dan Kesimpulan

Latar belakang lahirnya pendidikan Kewarganegaraan berawal dari perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai sejak dari perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai pada pengisian kemerdekaan, bahkan terus berlangsung hingga zaman reformasi. Kondisi perebutan dan mempertahankan kemerdekaan itu ditanggapi oleh bangsa indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membangun dan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang mencintai tanah air dan juga kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon- calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan. Pendidikan kewarganegaraan juga sangat diberlakukan hingga jenjang perguruan tinggi. Maka dari itu pendidikan kewarganegaraan memang sangat penting untuk dipelajari.

# Saran

Sebagai warga negara yang mencintai negaranya, kita harus memahami dan mengetahui sejarah perkembangan PKn, agar dalam melaksanakan pendidikan tidak terjadi kesalahan. Dan untuk kedepannya bisa menambah pengetahuan bagi penerus-penerus bangsa kita.

# Daftar Pustaka

Eprints UNY.2021. "Bab II Kajian Pustaka", https://eprints.uny.ac.id/22433/7/BAB%2 0II.pdf, diakses pada 14 Maret 2021

pukul 20.58.

Jamaludin, Ujang dkk. 2020. "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi", https://bpmku.unila.ac.id/wp- content/uploads/2020/04/Buku-Ajar- Bersama-BKSPTN-Barat-MK- Pendidikan-Kewarganegaraan.pdf, diakses pada 14 Maret 2021 pukul 21.14.

Wardhana, M. Y. C. (2019). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan. SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Fakultas Ilmu Sosial UM., diakses pada 14 Maret 2021 pukul 21.25.

Nurmalisa, Yunisca dkk. 2020. "Peranan Pembelajaran Pendidikankewarganegaraan",https://ejou rnal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/dow nload/10082/pdf, diakses pada 14 Maret pukul 21.36.

Nurgiansah, T. H. (2021). Petuah Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kontestasi Politik. Academy of Education Journal, 12(1), 39-47., diakses pada 14

Maret 2021 pukul 21.42.

Astuti, A. (2016). Pengembangan Nilai- nilai Kewarganegaraan Dalam Kegiatan

Ekstrakurikuler PRAMUKA di SMA Negeri 1 Kahu Kabupaten Bone. Jurnal Tomalebbi, 1(3), 19-26, diakses pada 14

Maret 2021 pukul 22.00.

Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negri Bojong 3 Pinang. BINTANG, 2(3), 418-

430., diakses pada 29 Maret 2021 pukul

13.50

Yanti, Christi. 2019. "Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar", https://osf.io/3uryt/download, diakses pada 29 Maret 2021 pukul 13.58

Pangestu, W. T. (2016). Pengembangan Buku Ajar Berorientasi Pendidikan Karakter pada Mata Kuliah Pembelajaran PKn SD di Program Studi S1 PGSD. Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran, 4(01)., diakses pada 29 Maret 2021 pukul 14.02

Anggraini, Novi. 2012. "Pelaksanaan Pembelajaran PKN sebagai Pendidikan Karakter di SMP Se-Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran 2011/2012",

[http://eprints.uny.ac.id/23772/1/Novi%20](http://eprints.uny.ac.id/23772/1/Novi) Anggarani.pdf, diakses pada 29 Maret 2021 pukul 14.18

Suwanda, Made. 2016. "Bab I Hakikat, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan", https://fkip.unri.ac.id/wp- content/uploads/2016/09/Materi-Bacaan-

Bab-I-Hakikat-Fungsi-dan-Tujuan- PPKn.pdf, diakses pada 29 Maret 20201

pukul 14.25

Org, World bank. 2020. "Mata Pelajaran PKN untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS)", <http://wbgfiles.worldbank.org/documents/> hdn/ed/saber/supporting\_doc/EAP/Teach ers/Indonesia/26.%20PPKN%20SMP.pdf

, diakses pada 29 Maret 2021 pukul 14.30

UNY, eprints. 2020. "Bab II Pendidikan Kewarganegaraan", https://eprints.uny.ac.id/8665/3/BAB%20 2%20-%2005401241022.pdf, diakses 29

Maret 2021 pukul 14.38

Aryanto, Rendi. 2013. "Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter di SMA N 1 Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta", https://eprints.uny.ac.id/24145/14/ringkas an.pdf, diakses pada 29 Maret 2021 pukul 14.45

Unibabwi, ppkn. 2017. "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", https://ppkn.unibabwi.ac.id/profil/visi- misi-2, diakses 29 Maret 2021 pukul

14.51

Mohandas, Ramon. 2014. "Pedoman Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan", <http://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikul> um/data/data/6%20Pedoman%20Kurikul um/Pedoman%20Guru/30- SMA\_02%20Pedoman%20PPKn.pdf, diakses pada 29 Maret 2021 pukul 14.59

Jamaludin, Ujang dkk. 2020. "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi", https://bpmku.unila.ac.id/wp- content/uploads/2020/04/Buku-Ajar- Bersama-BKSPTN-Barat-MK- Pendidikan-Kewarganegaraan.pdf, diakses pada 29 Maret 2021 pukul 15.04

Pendidikan, Dosen 3. 2021. "Pendidikan Kewarganegaraan", htt[ps://www.dosenpendidikan.co.id/pendi](http://www.dosenpendidikan.co.id/pendi) dikan-kewarganegaraan/, diakses pada 29 Maret 2021 pukul 15.16

Rahman, A., SH, M., & Baso Madiong,

S. H. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi (Vol. 1). Celebes Media Perkasa., diakses pada 29 Maret 2021 pukul 15.23